

BAB I

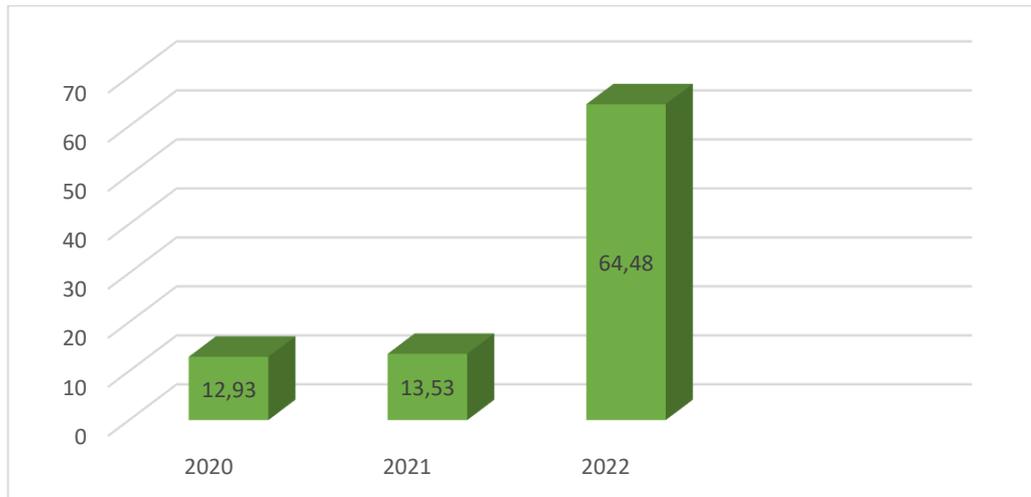
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Literasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan keterampilannya untuk membaca, menulis, memahami dan mengolah informasi yang telah didapatkan. Tetapi literasi tidak hanya kegiatan berupa menulis dan membaca saja melainkan dapat digunakan sebagai pengembangan kemampuan dari setiap orang dengan menggunakan informasi yang didapatkan, sehingga nantinya akan memberikan manfaat bagi sekitarnya dan dirinya sendiri. Kemampuan literasi yang baik dalam seseorang akan memberikan dampak pemahaman informasi yang didapatkan melalui informasi lisan ataupun tertulis (Oktariani & Ekadiansyah, 2020). Mengingat pentingnya literasi untuk kehidupan masyarakat agar masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk mengolah informasi dengan baik melalui menulis, membaca dan memahami. Namun hal tersebut tidak dapat dikatakan berhasil sepenuhnya di Indonesia yang mana memiliki tingkat literasi yang cukup rendah.

Berkaitan dengan fakta diatas yang menyebutkan masyarakat Indonesia memiliki literasi yang rendah karena tidak dapat mengolah informasi yang didapatkan dengan baik yang menyebabkan kesalahpahaman dalam memahami dan menerapkannya. Sehingga, tingkat literasi di Indonesia dapat dikatakan masih digolongkan pada titik rendah hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan dengan sebaran perpustakaan di seluruh Indonesia. Berdasarkan dengan data perpustakaan hingga 14 September 2023 jumlah perpustakaan di Indonesia sebanyak 178.723 perpustakaan dan terdapat pada seluruh daerah di Indonesia. Terdapat fakta yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kedua perpustakaan terbanyak di dunia, tetapi tidak membuat Masyarakat memiliki tingkat literasi yang tinggi, bahkan sebaliknya bahwa tingkat literasi Masyarakat Indonesia dan minat baca cukup rendah (Widyawati & Winoto, 2022).

Diagram 1. 1 Peningkatan IPLM Nasional

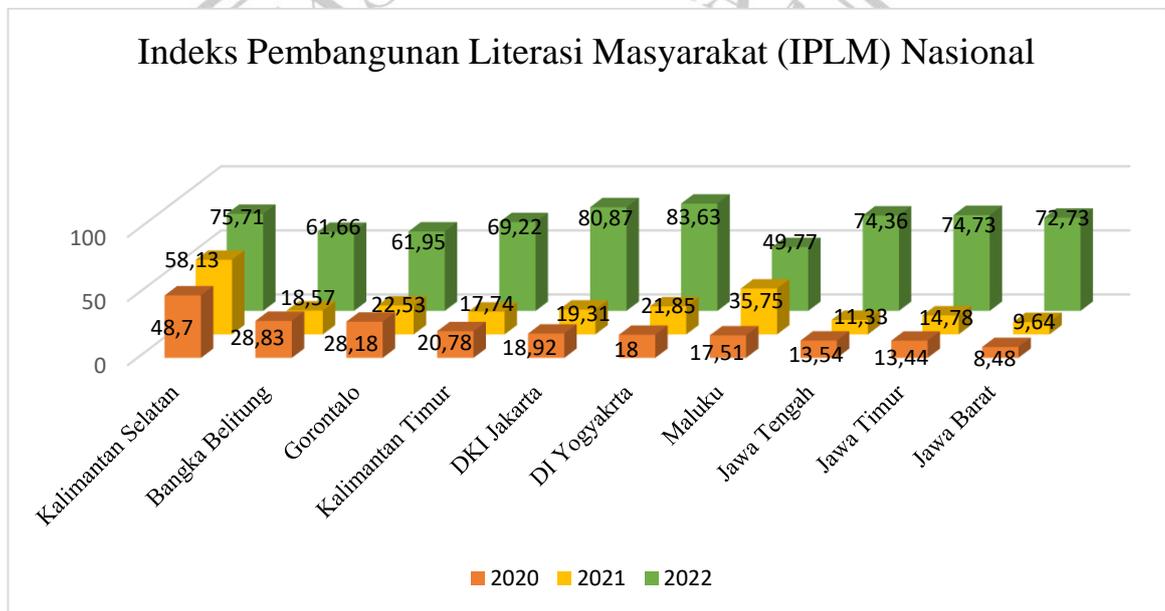


Sumber : Dokumen IPLM Perpustakaan Nasional tahun 2020, 2021, 2022

Berdasarkan dengan Diagram diatas dijelaskan bahwa kenaikan indeks Literasi selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan dengan data dari Perpustakaan nasional di tahun 2020 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indonesia masih dikatakan tergolong rendah yang berkisar hanya 12,93 persen dan untuk di tahun 2021 nilai mengalami kenaikan sebesar 13,53. Sedangkan pada tahun 2022 peningkatan cukup banyak dalam Indeks Pembangunan Literasi (IPLM) sebesar 64,48 persen. Berkat dari upaya yang dilakukan oleh pihak terkait salah satunya perpustakaan nasional yang menyalurkan program pendukung untuk pembangunan literasi masyarakat yang juga melibatkan pemerintah daerah beserta dinas terkait serta komunitas dan partisipasi masyarakat untuk mendorong keberlangsungan program hingga dapat meraih capaian target yang pada tahun sebelumnya ditargetkan naik 13,0 persen dan sudah diterangkan pada renstra Perpustakaan Nasional , maka capaian ini sudah mengalami kenaikan sebesar 14,23 persen. Sehingga Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tahun 2022 menginjak angka 64,48 dan dikonversi menjadi 13,55 serta sudah tercapai dengan pencapaian 104,23%. Artinya pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2022 sudah melebihi 0,55 atau 4,23% jika dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan dalam renstra Perpustakaan Nasional yaitu 13,0.

Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya infrastruktur yang diupayakan oleh pemerintah pusat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 13,54. Meskipun masih jauh dari target perpusnas yang mengharapkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menempati angka di 90 – 100 namun berkat dorongan dari pemerintah dan dukungan partisipasi masyarakat, perlahan indeks mengalami kenaikan. Hal tersebut juga dapat dibuktikan melalui capaian 10 provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir melalui tabel dibawah ini

Diagram 1. 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)



Sumber : Dokumen IPLM Perpustakaan Nasional 2020, 2021 dan 2022

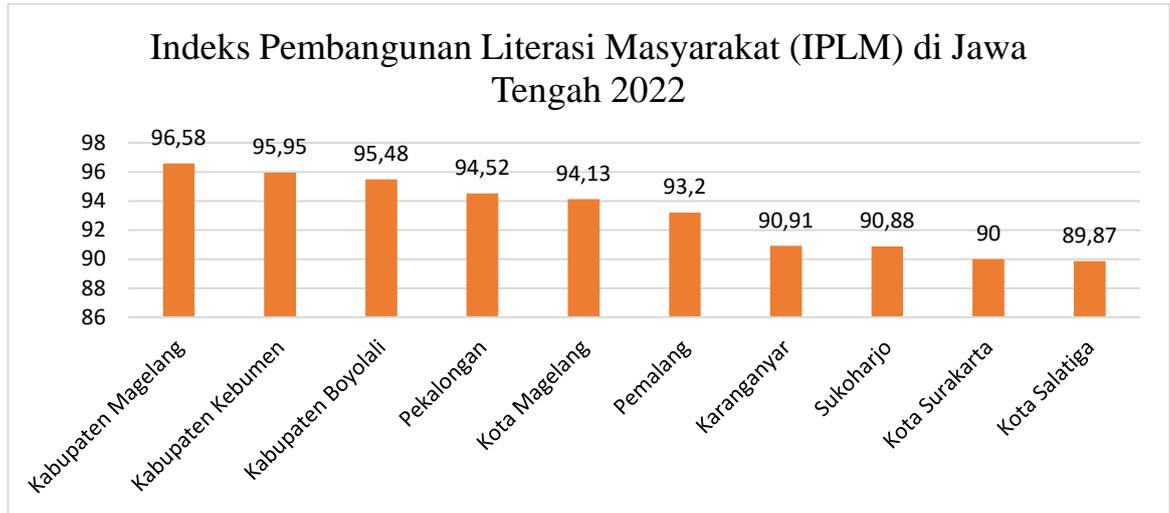
Berdasarkan dengan data literasi nasional diatas dengan mengambil sample 10 provinsi yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi. Adapun provinsi dengan pencapaian nilai IPLM tertinggi di tahun 2022 yaitu D.I. Yogyakarta 83,63, DKI Jakarta 80,87, Sulawesi Selatan 78,49, Kalimantan Selatan 75,71 dan Jawa Timur 74,73. Sedangkan lima provinsi dengan pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat terendah yaitu Maluku hanya 49,77, Maluku Utara 46,81, Sulawesi barat 41,36, papua Barat 37,58 dan Papua adalah Provinsi paling rendah capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

yang hanya 20,02. Hal tersebut dibuktikan dengan data capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 74,36.

Berdasarkan dengan data yang telah dijelaskan maka Provinsi Jawa Tengah tergolong dalam kategori sedang dan masuk pada peringkat 10 besar dengan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tertinggi se Indonesia. Sedangkan untuk Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tertinggi telah diraih oleh Kabupaten Magelang dengan angka 96,58. Hal itu tercapai karena terdapat peran dari pemerintah yang memberikan fasilitas berupa tersedianya perpustakaan umum Ber-SNP, meratanya pelayanan perpustakaan, koleksi perpustakaan, pemerataan tenaga kerja perpustakaan, tingkat kunjungan pemustaka, selain itu adanya keterlibatan Masyarakat dalam sosialisasi dalam Kegiatan perpustakaan. Nilai indeks literasi tidak hanya diambil dalam lingkup provinsi saja namun setiap kabupaten dan kota juga harus memiliki nilai indeks sendiri guna mengukur capaian kinerja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program. Dalam hal tersebut kemudian diambil sample dari provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Magelang di tahun 2022 merupakan daerah yang mendapatkan predikat tertinggi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) se-Jawa Tengah.

Keberhasilan yang dicapai dalam mendapatkan predikat baik dari setiap daerah kabupaten atau kota tentunya terdapat peran aktif dari setiap *stakeholders* terkait dalam mewujudkan daerahnya terbaik dalam hal literasi, bagaimanapun literasi adalah Langkah awal untuk memberikan kemajuan bangsa karena luasnya wawasan dan pemahaman ilmu yang dimiliki setiap individu menandakan bahwa kualitas hidup masyarakat dalam pemahaman dan pengolahan informasi dan ilmu yang telah didapatkan melalui literasi, sehingga mereka mampu mengolah dengan baik apa yang telah mereka terima. Sehingga hal itu dibuktikan melalui tabel literasi dari setiap provinsi salah satunya adalah Jawa Tengah yang disajikan dalam diagram dibawah ini.

Diagram 1. 3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)



Sumber: Dokumen IPLM Perpustakaan Nasional Tahun 2022

Berdasarkan data diatas dengan mengambil sample 10 kota dan kabupaten di Kabupaten Magelang yang memiliki nilai Indeks Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi diraih oleh Kabupaten Magelang sebesar 96,58. Kemudian untuk capaian tertinggi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Jawa Tengah diraih oleh Kabupaten Kebumen sebesar 95,95% dan kemudian Kabupaten Boyolali 95,48%. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi bentuk usaha dari pemerintah yang bertujuan untuk mengukur kinerja yang telah mereka lakukan, sehingga mereka mengetahui seberapa banyak ketercapaian yang didapat dalam pekerjaannya. Dalam menyukseskan capaian indeks sesuai dengan harapan perpustakaan maka diperlukannya dorongan dari masyarakat dan pemerintah untuk terus berusaha dalam mencapai target yang diinginkan.

Pemerintah sebagai pengelola kewenangan yang mempunyai hak dalam pemberian layanan serta sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakatnya, terdapat usaha dan upaya dalam mencapai hal tersebut. Salah satunya dengan memenuhi kewajiban pemerintah dalam meningkatkan literasi dan mempertahankan indeks literasi Masyarakat agar tetap berada pada angka yang sudah dicapai dan dapat ditingkatkan Kembali. Upaya pemerintah agar indeks literasi tetap baik dilakukan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta peran dari Perpustakaan Daerah dengan melaksanakan program-program yang dapat

menunjang nilai literasi meningkat. program-program yang diberikan oleh pemerintah sendiri bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas dari Masyarakat itu sendiri melalui literasi dengan memaksimalkan peran dan fungsi perpustakaan. (Haidar, 2018).

Dalam upaya meningkatkan indeks literasi, pemerintah melaksanakan sebuah program yang bertujuan untuk mengetahui indeks Pembangunan literasi Masyarakat (IPLM). Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), memperkuat fungsi dan peran perpustakaan sebagai media belajar sepanjang hayat. Dalam program ini perpustakaan bukan digunakan sebagai tempat untuk mencari informasi dan membaca buku saja, tetapi perpustakaan digunakan sebagai wadah dalam mengembangkan bakat Masyarakat yang tidak berkembang karena tidak tersedianya wadah untuk melakukan perkembangan *skill* yang mereka miliki. Sehingga pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten atau kota dan Pemerintah Desa menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah dinaungkan untuk mewadahi kemampuan yang dimiliki Masyarakat. (Purwantini et al., 2021).

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tercantum dalam Peraturan Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional RI memiliki kebijakan tentang perpustakaan yang harus mengalami perubahan yaitu Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan salah satu program prioritas dari Perpustakaan Nasional dan mendapat dukungan dari Bappenas. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial (TPBIS) ini diluncurkan perpustakaan nasional dengan kengikutsertakan pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah desa dan kelurahan sebagaimana bertugas untuk perkembangan manfaat serta kedudukan dalam menyalurkan pelayanan kepada Masyarakat, serta mendapatkan dukungan dari Bapennas untuk mereplikasikan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Sehingga dengan hal tersebut Masyarakat mendapatkan kelayakan pelayanan perpustakaan dan Sejahtera (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2023).

Perpustakaan Inklusi Sosial ini juga diperuntukkan pada penyandang difabel, yang mana mereka memiliki hak untuk melakukan produktifitas seperti orang normal lainnya. Sehingga dalam program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ini diberikan fasilitas, sarana dan prasarana khusus untuk penyandang disabilitas. Kegiatan dan pelatihan pun juga diberikan kepada mereka, guna memberikan kesempatan dan mendapatkan haknya untuk bisa meningkatkan produktifitas walaupun mereka memiliki keterbatasan tetapi masih bisa untuk berkarya sama seperti dengan orang normal lainnya.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang diamanatkan untuk mengimplementasikan program prioritas dari Perpusnas dan telah berhasil mendapatkan penghargaan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas dan Kearsipan Kabupaten Magelang, dikarenakan berkat komitmen yang dipertahankan dalam proses berjalannya program dapat terlaksana dengan baik dan berhasil meraih penghargaan dan masuk dalam 4 kategori yang pertama sebagai perpustakaan Kabupaten/Kota yang berhasil mengimplementasikan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) pada tahun 2021, capaian tersebut meraih penghargaan secara terus-menerus selama 3 tahun.

Kategori kedua berupa *Honorable Mention* Nasional atas nama Amroni, selaku Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan serta Person in Charge (PIC) atau pembicara dalam koordinasi yang disampaikan pada perpustakaan nasional terkait dengan program perpustakaan pada tahun 2021. Selanjutnya kategori ketiga, Kabupaten Magelang mendapatkan penghargaan pada perpustakaan desa yaitu Perpustakaan Pondok Sejuta Ilmu Desa Ngablak Kecamatan Ngablak menjadi Perpustakaan Desa/ Kelurahan Terbaik pada replikasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Tahun 2021. Kategori keempat penghargaan diterima oleh salah satu perpustakaan desa juga di Kabupaten Magelang yaitu Perpustakaan Sahwahita Desa Butuh Kecamatan Sawangan menjadi juara Lomba Foto Peer Learning Meeting (PLM) Nasional 2021.

Pencapaian keberhasilan perpustakaan dalam memberikan pelayanan dalam bidang literasi dapat diketahui melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang baik. Oleh sebab itu setiap daerah tentu harus mengetahui dan memiliki Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat guna mengetahui capaian keberhasilan program

yang telah diimplementasikan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang telah memiliki beberapa Kegiatan pada bidang literasi dengan tujuan memenuhi tugas mereka untuk melayani dan memberikan fasilitasi kepada Masyarakat agar dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan mengembangkan kemampuan individu yang dimiliki. Dalam peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dijelaskan bahwasanya untuk mencapai bangsa yang cerdas dan memiliki generasi yang unggul maka peran perpustakaan sebagai tempat mencari informasi dan tempat belajar sepanjang hayat berkewajiban memberikan upaya untuk perkembangan kemampuan yang dimiliki oleh Masyarakat agar menjadikan setiap individu menjadi insan yang berkualitas (Magelang, 2022).

Program Perpustakaan Nasional berupa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang adalah daerah yang diamanatkan untuk menerima manfaat agar dapat mereplikasikan program ini pada setiap perpustakaan di desa serta pengimplementasian Kegiatan program juga penyelenggaraan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) mendapatkan predikat sangat baik dalam pelaksanaannya. Hal itu dilakukan dengan melakukan seleksi perpustakaan yang layak untuk direplikasikan program TPBIS. Capaian dengan penilaian pelaksanaan program TPBIS terbaik secara nasional tentu terdapat praktek tata kelola kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang dalam menjalankan program dari pemerintah pusat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang dengan para *stakeholders* untuk berkomitmen dalam pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ini sehingga sampai mendapatkan predikat baik dan dinyatakan pengimplementasian program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) terbaik pada Tingkat nasional di tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tata Kelola Kolaborasi untuk meningkatkan Pembangunan Literasi di Kabupaten Magelang?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi pada Tata Kelola Kolaborasi untuk meningkatkan Pembangunan Literasi di Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada di dalam penelitian :

1. Mengetahui Tata Kelola Kolaborasi untuk meningkatkan Pembangunan Literasi di Kabupaten Magelang.
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi pada Tata Kelola Kolaborasi untuk meningkatkan Pembangunan Literasi di Kabupaten Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis atau praktis yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kajian pengembangan Tata Kelola Pemerintahan lebih khusus Tata Kelola Kolaboratif. Selain itu juga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana bentuk pola Kerjasama tata Kelola kolaborasi pemerintahan (*collaborative governance*) serta komitmen dari para pemangku kepentingan pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat digunakan sebagai bahan rujukan serta sumber informasi bagi pihak yang memiliki ketertarikan dengan topik pembahasan yang serupa pada penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Magelang harus terus memperhatikan Kerjasama kolaborasi pemerintahan pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk swasta diharapkan dapat memberikan manfaat dengan dijadikan

penelitian ini sebagai acuan untuk mengetahui komitmen dari organisasi dan dapat memberikan kemudahan untuk menentukan strategi dalam mempertahankan komitmen. Sedangkan untuk masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas terhadap pembaca dan memberikan informasi pengetahuan pada masyarakat. Selain itu penelitian juga memiliki manfaat untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Tata Kelola Kolaborasi (*Collaborative Governance*)

Collaborative Governance hadir dengan memiliki konsep yang berkesinambungan antara pemerintah dengan *stakeholders*. Teori kolaborasi memiliki fokus pada permasalahan yang terjadi di publik dengan memiliki perbedaan pada konsep pemerintahan yang mana dalam hal ini terdapat isu-isu publik disertakan dengan adanya pemecahan permasalahan yang terjadi. Era globalisasi, pemerintah memiliki tuntutan untuk berperan aktif dalam memberikan wadah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan negara. Oleh sebab itu agar pemerintah dapat mewujudkan tujuan dan capaiannya perlu untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan pemerintah harus melakukan Kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain dapat menjalin Kerjasama dengan pemangku kepentingan, konsep *collaborative governance* juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana cara pemerintah merespon permasalahan yang terjadi di publik dan menyelesaikannya (Bila & Saputra, 2019).

Menurut Asropin Gunawan dan Muhammad Farid Ma'ruf dalam jurnalnya mengutip (Haryono, N.,2012) yang mengatakan bahwa segala perbuatan yang mencakup Kegiatan Kerjasama, saling berhubungan dan saling mengerti dari pihak-pihak yang terlibat baik secara individu, lembaga ataupun pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dengan memperoleh akibat dan manfaat. Pernyataan Haryono terkait dengan *collaborative governance* itu dapat dipahami bahwa Sebagian susunan pemerintah melalui lembaga ataupun pihak yang secara langsung dan tidak langsung akan terlibat dengan *stakeholders* terkait, bahkan pada pihak swasta pun juga menerima dampak yang terjadi dari penyelenggaraan

pemerintah dengan berupa bentuk pengambilan Keputusan yang bersifat formal dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan sebuah kebijakan yang telah ada dalam tuntutan pemerintah (Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020). Fokus dalam penelitian ini terletak pada komitmen yang terjalin antara satu dengan pemangku kepentingan lainnya, adapun indikator dalam penelitian ini akan meneliti hal berikut pada subbagian di bawah ini:

1.5.1.1 Komitmen Terhadap Proses (*commitment to process*)

Komitmen terhadap proses merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Ansell and Gash dalam penelitiannya mengenai proses kolaborasi. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana komitmen yang dijalin oleh para pemangku kepentingan dalam menjalankan sebuah program dalam jangka panjang yang melibatkan banyak *stakeholders* untuk turut serta berpartisipasi dalam kesuksesan pelaksanaan program. Indikator komitmen terhadap proses ini memiliki item berupa partisipasi para pemangku kepentingan yang mana dalam penelitian nanti akan melihat partisipasi dalam bentuk apa yang diberikan kepada pelaksana program dari para pemangku kepentingan.

Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program dengan membangun komitmen antar pemangku kepentingan sehingga percaya satu sama lain. Kemudian tidak hanya itu, keterbukaan dalam sebuah komitmen pada proses pelaksanaan sebuah program yang cukup besar dan memiliki dampak untuk masyarakat tentunya keterbukaan antara pemangku kepentingan dan juga masyarakat juga harus terjalin dengan baik.

1.5.1.2 Pemahaman Bersama (*share understanding*)

Pemangku kepentingan yang telah memberikan partisipasinya kepada pelaksana program yang diberikan kepada masyarakat perlu memiliki visi dan misi yang sama antar satu sama lainnya. Pemahaman yang dimiliki setiap individu harus memiliki kesamaan dan memiliki pemahaman yang sama terhadap program dan tujuan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya komitmen yang terjalin antar pemangku kepentingan pemahaman dan visi serta misi nantinya akan menemukan

jalan keluar berupa Keputusan yang dilakukan melalui musyawarah bersama dengan pemangku kepentingan yang lainnya.

Pemahaman bersama dalam organisasi dengan para pemangku kepentingan terbentuk melalui dengan adanya interaksi antar anggota melalui diskusi, proses komunikasi yang dilakukan secara terus menerus. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya faktor dari para pemangku kepentingan berdasarkan dengan pengalaman bersama, budaya dari organisasi dan kepemimpinan. Apabila pemahaman bersama (*share understanding*) sudah terbentuk dalam sebuah Kerjasama, maka anggota dan tim yang akan melaksanakan sebuah program dapat mampu bekerja sama secara sinergis dan mampu untuk mengatasi apabila adanya hambatan yang datang serta memperkuat komitmen yang telah dijalin. Oleh karena itu visi dan misi dari setiap individu sangat dibutuhkan dan diharapkan memiliki visi dan misi yang sama antar satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan.

1.5.2 Pembangunan Literasi Masyarakat

Pembangunan literasi masyarakat adalah peran untuk memberikan kemampuan berpikir secara kritis terhadap masyarakat. Hal itu dikarenakan aktivitas dalam membaca dan menulis seseorang diharuskan untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan juga wawasan dari hasil mereka membaca. Tetapi dalam pembangunan literasi terhadap masyarakat ini diharuskan masyarakat dapat mampu dengan mudah untuk dapat berpikir secara kritis atau dapat mengolah informasi atau pengetahuan apa yang telah mereka dapatkan melalui membaca. Sehingga nantinya dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan memahami apa yang dilakukan. Pembangunan literasi tidak hanya sekedar memiliki kemampuan membaca dan memahami informasi yang didapatkan melalui media manapun, tetapi literasi dapat berupa pengetahuan akan teknologi, politik, berpikir secara kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar (Oktariani & Ekadiansyah, 2020).

Berpikir kritis dalam pembangunan literasi juga sangat diperlukan yang bertujuan untuk menjadikan seseorang tersebut literat yang artinya memahami apa yang dibaca dan informasi yang diterima dan dapat diolah dengan baik. Pentingnya

seseorang menjadi literat agar negara Indonesia dapat bangkit dan dapat berada di posisi yang sejajar dengan bangsa lain yang memiliki Sumber Daya Manusia dengan kapasitas literasi yang tinggi dan mendukung seseorang untuk dapat menangani berbagai permasalahan. Sehingga pembangunan literasi untuk masyarakat agar dapat memiliki kemampuan berpikir kritis dan dapat mengolah informasi ini sangat berfungsi dan efektif dalam kehidupan yang nantinya akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang terakumulasi dalam proses pembelajaran. Karena bagaimanapun bangsa yang cerdas adalah bangsa yang ditandai dengan tingkat Pendidikan dan kemampuan literasi yang baik.

1.5.3 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

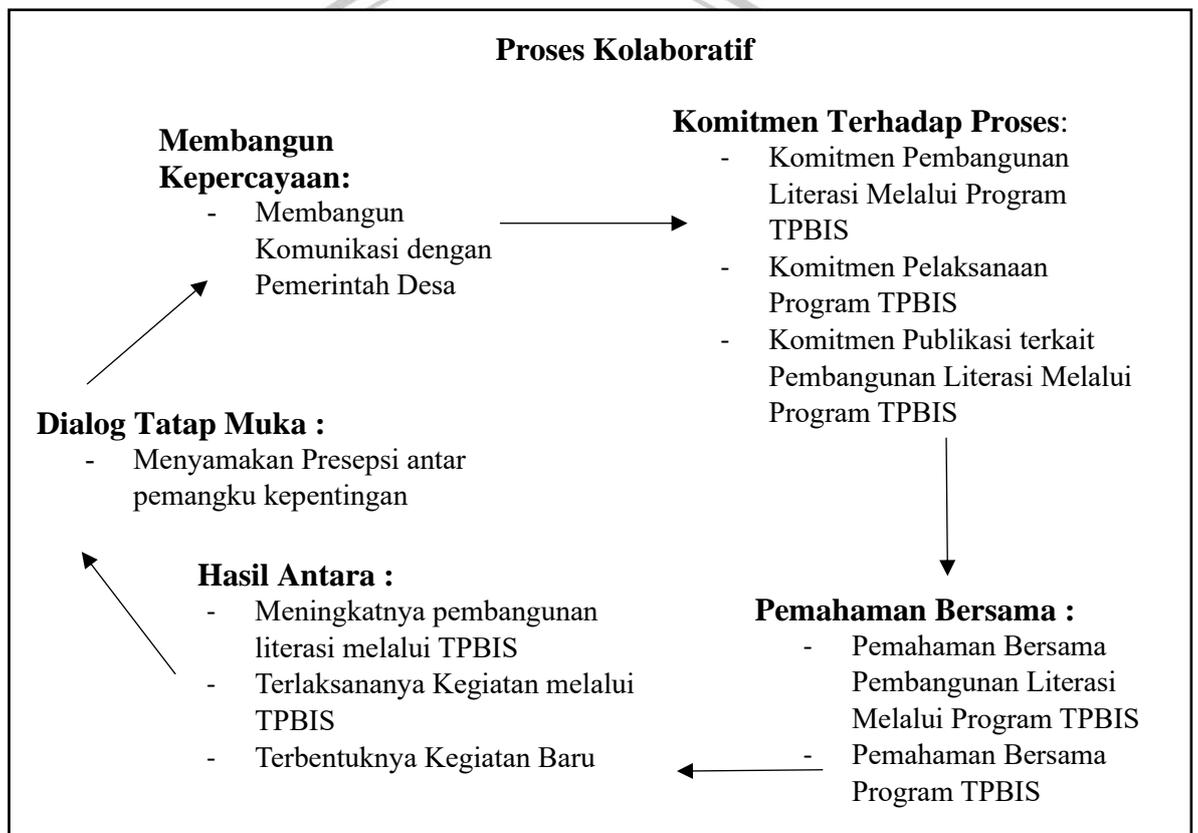
Perpustakaan Nasional memiliki program prioritas untuk meningkatkan pembangunan literasi masyarakat dengan mengeluarkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui literasi serta memperkuat kembali fungsi dari perpustakaan. Hal tersebut bermaksud agar perpustakaan dapat dijadikan sebagai wadah untuk belajar sepanjang hayat yang dimana perpustakaan tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk meminjam dan membaca buku saja, namun perpustakaan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan seperti contohnya pelatihan. Hadirnya perpustakaan berbasis inklusi sosial ini juga bertujuan untuk dapat memfasilitasi masyarakat desa yang jauh dari perkotaan untuk dapat mudah menjangkau perpustakaan dengan adanya perpustakaan di desa dan para penyandang disabilitas juga dapat mengikuti kegiatan diperpustakaan, dikarenakan inklusi sosial sendiri juga berarti dapat menjangkau semua kalangan untuk turut serta berpartisipasi dalam program tersebut.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) membantu setiap manusia dan seluruh masyarakat mampu untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri masing-masing serta dapat memberikan peningkatan pada sosial. Perpustakaan berbasis inklusi sosial juga turut mendukung komunitas, orang dewasa dan keluarga untuk belajar dengan menghadiri setiap kegiatan yang diselenggarakan di perpustakaan. Perpustakaan berbasis inklusi

sosial juga memberikan kemudahan untuk mengakses bahan pustaka dan sumber informasi, masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan untuk berbagai pengalaman dan melatih keterampilan agar dapat memperoleh keahlian dan pekerjaan yang dapat meningkatkan kualitas hidup setiap individu serta menjadi ruang kegiatan masyarakat di setiap daerah dan desa untuk melakukan kegiatan di perpustakaan (Woro Titi Haryanti, 2019).

1.6 Kerangka Berfikir

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir



Sumber : Diolah, Tahun 2024

Kerangka berfikir diatas menjelaskan proses terjadinya kolaborasi menurut Ansell and Gash. Menurut Ansell and Gash proses kolaborasi terjadi melalui beberapa tahapan yang pertama yaitu Dialog Tatap Muka yang dimana dalam proses ini dijelaskan proses awal yang dilakukan sebelum menjalankan sebuah program, dalam penelitian ini proses kolaborasi dalam tahapan yang pertama dilakukan dengan kegiatan berupa menyamakan presepsi dengan pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan literasi melalui Program Transformasi

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Tahapan selanjutnya dilakukan dengan membangun kepercayaan antar *stakeholders* yang dilakukan dengan membangun komunikasi dengan pihak pemerintah desa untuk menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kegiatan pembangunan literasi melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Setelah membangun kepercayaan melalui komunikasi dengan pihak desa kemudian terdapat komitmen yang dilakukan dengan beberapa hal seperti komitmen pembangunan literasi melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Komitmen pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Komitmen publikasi terkait dengan pembangunan literasi melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

Dilanjutkan dengan pemahaman bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan melakukan pemahaman bersama terkait dengan pembangunan literasi melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan pemahaman bersama terkait dengan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Terakhir terdapat proses hasil antara yang didalamnya terdapat hasil sementara dari proses pelaksanaan pembangunan literasi melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) berupa meningkatnya pembangunan literasi di Kabupaten Magelang melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), terlaksananya kegiatan di perpustakaan untuk meningkatkan pembangunan literasi melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan yang terakhir adanya kegiatan untuk tambahan kegiatan di perpustakaan dalam upaya meningkatkan pembangunan literasi di Kabupaten Magelang.

1.7 Definisi Operasional

1.7.1 Praktek Kolaborasi yang terjadi dalam pengimplementasian Program TPBIS untuk meningkatkan IPLM di Kabupaten Magelang :

1. Terlaksanakannya Komitmen Antar Stakeholders Dalam Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Magelang
 - a. Komitmen *Stakeholders* Terhadap Pembangunan Literasi Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)
 - b. Komitmen pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)
 - c. Komitmen Publikasi Pembangunan Literasi Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)
2. Pemahaman Bersama Antar *Stakeholders* dalam Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)
 - a. Pemahaman Bersama Antar *Stakeholders* Terhadap Pembangunan Literasi Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)
 - b. Pemahaman Antar *Stakeholders* Terkait Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

1.7.2 Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Kabupaten Magelang

- 1) Proses awal pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang
- 2) Sosialisasi setiap akan melaksanakan Kegiatan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
- 3) Ketercapaian pasca pelatihan dari kegiatan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini digunakan sebagai penelitian yang memiliki pembahasan luas dan lebih terperinci, hal itu dikarenakan dalam proses penelitian tidak hanya meneliti permasalahan saja melainkan juga meneliti variabel lainnya yang memiliki hubungan dengan topik penelitian yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif lebih untuk mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya fenomena yang terjadi di masyarakat dijelaskan dengan terperinci (Moleong, 2005). Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dalam peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Magelang. Harapannya dari penelitian ini dapat memberikan gambaran keadaan sebenarnya di lapangan tidak hanya sekedar dalam penyajian data saja.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah kualitatif deskriptif berupa data sekunder dan data primer dan data tersebut dinyatakan dalam bentuk uraian kalimat. lebih jelasnya mengenai sumber data sebagai berikut :

1.8.2.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dan peneliti mendapatkannya pada saat melakukan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Sekertaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang melalui data wawancara, dan Kepala penanggung jawab Program kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang.

1.8.2.2 Data Sekunder

Peneliti memperoleh data sekunder melalui dokumen dan arsip berupa Arsip-arsip ataupun lampiran yang terkait dengan penelitian dan peneliti mendapatkan laporan dan notulensi hasil rapat. Adapun dokumen-dokumen yang di dapat saat penelitian yaitu buku pedoman pelaksanaan Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), jurnal

penelitian, buku literature, Dokumen Peraturan yang membahas tentang pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisis. Pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara dengan narasumber terkait dan dokumentasi. Data dokumen berupa renstra perpustakaan nasional, laporan IPLM tahun 2020, 2021 dan 2022, jurnal ilmiah dan buku. Sedangkan untuk data wawancara diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, data observasi didapatkan dengan melihat Kegiatan di media sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang serta melihat kondisi di lapangan pada saat mengikuti rapat koordinasi.

1.8.3.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, laporan yang dapat mendukung penelitian (Iryana, 2019). Dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data untuk mendukung penelitian berupa Notulensi rapat dan koordinasi Kegiatan TPBIS, Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), serta laporan Kegiatan lainnya yang relevan dengan penelitian yaitu tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Artikel yang memiliki keterkaitan dengan Tata Kelola Kolaborasi pemerintahan. Adapun dokumen-dokumen yang didapatkan saat penelitian yaitu buku pedoman pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang berasal dari Perpustakaan Nasional sebagai pedoman di setiap daerah. Selain itu ada juga dokumen tugas pokok dan fungsi, kedudukan, susunan organisasi serta tata kerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Penulis juga menggunakan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang menjelaskan tentang keikutsertaan atau partisipasi dari pihak yang memiliki kepentingan dalam berjalannya program perpustakaan.

Dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi analisis penulis terhadap apa yang terjadi di lapangan. Dokumen tugas pokok dan fungsi digunakan peneliti untuk mensinkronkan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang untuk melakukan tugasnya. Sedangkan buku pedoman yang berasal dari perpustakaan nasional untuk daerah digunakan oleh penulis sebagai acuan untuk mensinkronkan apakah kolaborasi dan komitmen dari Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang dengan pihak terkait apakah sudah sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional

1.8.3.2 Wawancara

Menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali data dan mencari jawaban serta menemukan informasi (Iryana, 2019). Tahapan wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung melalui tanya jawab. Peneliti melakukan wawancara ini bersama dengan Pustakawan ahli Dispuspa Kabupaten Magelang Bapak Wahyu Puji P. yang sekaligus memiliki tanggung jawab pada pengimplementasian program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Kegiatan wawancara ini juga didampingi dengan konsultan tempat magang peneliti dari PT. Sinergi Visi Utama, Yogyakarta Bapak Rendra Agusta. Peneliti melakukan wawancara bersama beliau dikarenakan berlangsung dengan Kegiatan Dinas Perpustakaan dengan Konsultan berupa Rapat Koordinasi. Selain itu, peneliti juga melaksanakan wawancara Kembali setelah selesai melaksanakan kegiatan magang melalui *calling* WhatsApp.

1.8.3.3 Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik apabila dilakukan perbandingan dengan Teknik yang lain (Iryana, 2019). Observasi yang digunakan Peneliti untuk melakukan pemahaman pada komitmen yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan cara mengunjungi lokasi penelitian secara langsung untuk melakukan pengamatan dan penelitian terhadap situasi dan kondisi melakukan pengamatan dan pencatatan langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang serta beberapa melihat melalui media sosial untuk

mengetahui pelaksanaan sebelumnya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang yang memiliki keterkaitan terhadap komitmen pemerintahan dengan pihak terkait pada pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

1.8.4 Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang atau pelaku yang menguasai dan terlibat langsung terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Wahyu Puji P selaku staff bidang perpustakaan dan penanggung jawab program perpustakaan termasuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Berdasarkan dengan hasil wawancara terhadap subjek penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan data pelaksanaan program berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Harapannya subyek penelitian dapat membantu peneliti mendapatkan dan mengumpulkan data.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan Teknik untuk menganalisis data kualitatif dengan menemukan berbagai kumpulan kata dan bukan angka yang menyebabkan tidak dapat menyusun kedalam kategori klasifikasi dan dalam Teknik analisis data terdapat tiga model analisis yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data menurut (Miles, 2014) yang dikutip oleh Feny, Anita dan Kusumayra dalah proses memilih, memilah hal pokok, mengklasifikasikan tema dan pola yang sama guna mempermudah peneliti mengumpulkan data pada tahapan selanjutnya (Feny Rita Fiantika, Anita Maharani, 2022). Dalam reduksi data peneliti mengumpulkan sumber data berupa dokumen seperti Jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pedoman Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Dokumen IPLM

2020-2022, Surat Edaran Bupati Nomor : 660.1/060/01.02/2019 Tentang Himbauan untuk Melakukan Donasi Bibit Pohon dan Buku. Kemudian menggolongkan dokumen yang diperlukan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, merangkum dan melakukan seleksi pada informasi dan data yang perlu. Sehingga dari hal tersebut akan didapatkan jawaban yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM) dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Analisis data diperoleh dengan melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wahyu selaku staff bidang perpustakaan dan penanggung jawab program perpustakaan. Setelah dilakukan reduksi data maka data tersebut akan digolongkan dan dilakukan penyeleksian data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data menurut (Miles, 2014) yang dikutip oleh Feny, Anita dan Kusumayra menjelaskan terkait dengan penyajian data dapat disajikan dengan menggunakan beberapa tabulasi berupa bagan, flowchart dan dapat dijelaskan menggunakan narasi (Feny Rita Fiantika, Anita Maharani, 2022). Pada proses penyajian data ini peneliti melakukannya dengan mengklasifikasikan data berupa dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Peraturan Perpustakaan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Buku Pedoman Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Surat Edaran Nomor : 660.1/060/01.02/2019 Tentang Himbauan untuk Melakukan Donasi Bibit Pohon dan Buku. Selain itu juga mengkonfirmasi Kembali data dokumen dengan wawancara kepada Sekertaris Bidang Perpustakaan Kabupaten Magelang serta observasi kepada pihak terkait. Kemudian setelah terkumpul data yang telah dikelompokkan dilakukan klasifikasi data kedalam bentuk tabel dan grafik serta narasi dalam penelitian yang disesuaikan dengan topik penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut (Miles, 2014) yang dikutip oleh Feny, Anita dan Kusumayra berisikan aktivitas analisis yang menarik dan mengkonfirmasi kesimpulan sejak awal pengumpulan data, analisis data dengan menemukan temuan yang perlu untuk dipertanyakan dengan jelas dan rasional dikemudian harinya (Feny Rita Fiantika, Anita Maharani, 2022). Penarikan kesimpulan di dalam penelitian ini didasarkan pada kevalidan hasil penelitian yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di lapangan pada saat penelitian terkait dengan penyelenggaraan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) kemudian disinkronisasikan pada dokumen yang telah di dapatkan berupa Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Peraturan Perpustakaan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Buku Pedoman Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Surat Edaran Nomor : 660.1/060/01.02/2019 Tentang Himbauan untuk Melakukan Donasi Bibit Pohon dan Buku. Setelah itu dalam penarikan kesimpulan terdapat sebuah temuan dalam penelitian hingga terbentuknya saran.